

# Konstruksi Nilai-Nilai Demokrasi Kelompok Islam Fundamentalists di Media *Online*

## *Construction Of Democratic Values By Islam-Based Fundamentalist-Groups In Online Media*

Karman

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI), Jakarta.  
Jl. Pegangsaan Timur 19B Jakarta Pusat. Kode Pos : 10320. Telp/Fax : 021-31922337

karman@kominfo.go.id

Diterima: 22 September 2015 || Revisi: 19 November 2015 || Disetujui: 20 November 2015

**Abstrak** - Indonesia sebagai negara demokrasi harus melaksanakan sistem dan nilai-nilai demokrasi. Implementasi demokrasi ini mendapat tantangan sebagian umat Islam (kelompok fundamentalis). Studi literatur menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dan Islam lebih banyak disorot dari sisi politik dan pada tataran prosedural (pemilihan umum). Peneliti terjebak cara berfikir oposisi biner: Islam moderat versus fundamentalisme. Artikel ini membahas konstruksi wacana nilai-nilai demokrasi oleh kelompok Islam fundamentalis di media *online*. Kelompok Islam fundamentalis yang dimaksud adalah JAT, MMI, dan HTI. Aspek yang dikaji adalah konstruksi kelompok Islam fundamentalis terhadap HAM, kebebasan beragama, kelompok minoritas, kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan perspektif Teori Konstruksi Realitas Sosial dan model analisis wacana Theo Van Leeuwen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penolakan mereka terhadap demokrasi sebatas pemilihan umum. Mereka menerima nilai-nilai demokrasi berupa HAM, kelompok minoritas, dan kebebasan berekspresi. Mereka cenderung menolak kebebasan beragama. Penerimaan mereka terhadap nilai-nilai demokrasi tersebut harus dipahami dalam konteks bisa didamaikan dengan nilai-nilai Islam. Kelompok Islam fundamentalis melakukan adaptasi, reinterpretasi, kontekstualisasi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan aspirasi Islam. Media *online* adalah sarana efektif untuk mendiseminasikan gagasan mereka. Kajian selanjutnya dianjurkan untuk memperdalam fenomena fundamentalisme ini pada aspek pemaknaan, pengalaman, atau dialektika mereka sebagai agen/struktur.

**Kata Kunci:** kelompok Islam fundamentalis, media *online*, nilai-nilai demokrasi

**Abstract** - Indonesia -as a democratic country- implements system and democratic values. In the its implementation, Indonesia gets challenges from Islam-based fundamentalism movement. Literature study shows that relation democracy and Islam focus more on political facets and procedural democracy (general election). Researchers get tied by binnary-opposition way of thinking: moderat Islam versus fundamentalism. This article deals with Islam-based fundamentalist-group's construction on democratic-value discourse in online media. Those groups are JAT, MMI, and HTI. We focus on Islam-based fundamentalist group's construction on human rights, freedom of faith, minority group, and, freedom of expression. This research harnesses social construction perspective theory and discourse analysis model of Theo Van Leeuwen. The result shows that their repudiation against democracy only in general election meaning. They accept democratic values, i.e., human rights, minority group, and, freedom of expression but they tend to disagree to freedom of faith. Hence, their democratic-value acquiescence can be only understood in the context of Islamic value. Those Islam-based fundamentalist-groups make adaptation, reinterpretation, and contextualization of the democratic values in compliance with Islam aspiration. Online Media (internet) is an effective vehicle to spread out fundamentalist's thought. Further researches should investigate this fundamentalism phenomenon from the aspect of their reception, experience, or dialectic as an agent/structure.

**Keywords:** Islam-based fundamentalist-groups, online media, democratic values

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi diindikasikan dengan adanya pemilihan umum, adanya kompetisi antarindividu/partai politik untuk jabatan pemerintahan, partisipasi politik warga, kebebasan sipil, politik, berbicara, pers, serta kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (Gaffar, 1996: 6-7; Dahl, 2000: 37; Indeks Demokrasi

Indonesia/IDI, 2011: 6). Demokrasi modern mencakup sepuluh komponen: Jaminan hak azasi manusia; pemisahan kekuasaan dan negara hukum; menerima perbedaan; parlemen dan pemerintah diputuskan melalui pemilihan yang adil, bebas, dan rahasia; adanya otonomi daerah dan komunitas lokal; pelaksanaan pemilihan umum; kebebasan berserikat dan membentuk asosiasi; adanya masyarakat sipil

(organisasi, serikat, asosiasi dan jaringan); terciptanya ranah publik, termasuk media komunikasi yang bebas dan terbuka terhadap pemikiran, usul, dan kritik dari semua lapisan masyarakat; dan terciptanya budaya politik (Meyer, 2002: 15-39).

Held memotret fenomena demokrasi melalui dua pendekatan: normatif-maksimalis, empirik-minimalis. Pendekatan normatif maksimalis fokus kepada substansi demokrasi. Pendekatan empirik-minimalis fokus kepada prosedur demokrasi (Suyatno, 2004: 38; Huntington, 1995: 5-6; Talbi dalam Marquand dan Nettle, 2000: 55).

Demokratisasi di suatu negara tidak lepas dari peran agama. Ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya (e.g., Liddle, Huntington) yang menunjukkan bahwa agama menentukan perilaku politik. Liddle (1963-1964) melakukan penelitian di daerah Pematang Siantar. Hasilnya menunjukkan bahwa warga Pematang Siantar di Tapanuli Utara memilih Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Sementara itu, warga Tapanuli Selatan memilih Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Demokratisasi di Korea Selatan berpengaruh kepada konversi dari agama Budha ke Agama Kristen (Huntington, 1995: 89).

Demokratisasi di Indonesia mendapat respon beragam dari kelompok Islam. Respon mereka dapat dibagi menjadi dua: (1) kelompok Islam yang menerima demokrasi; (2) kelompok Islam yang menolak demokrasi (Haqqani, 2013: 7).

Kelompok Islam yang menerima demokrasi sering disebut kelompok Islam moderat atau substansialis. Sebaliknya, kelompok Islam yang menolak sistem demokrasi sering disebut kelompok Islam fundamentalis, skripturalis, revivalis.

Fundamentalisme pada dasarnya adalah kembali kepada "fundamentals (dasar-dasar) agama secara "penuh" dan "literal", bebas dari kompromi, penjinakan, dan reinterpretasi (Azra dalam Qohar, 2011: 1).

Fundamentalisme lahir karena adalah perubahan situasi global dan problem identitas/konflik identitas (Zuhri, 2011: 29); tata kelola pemerintah yang buruk (Javaid, 2011: 17); penolakan terhadap tata nilai Barat yang sekuler (Abdula'la, 2008: 10) serta menolak gerakan sekularisasi yang dilakukan oleh Barat (Ausop, 2009: 611); cara penafsiran dan keyakinan bahwa "Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan", mencakup *dîn* (agama), *dunyâ* (dunia)

dan *dawlah* (negara); tekanan rezim politik dan dan kegagalan rezim yang berkuasa (Suyatno, 2004: 137); terobsesi kembali ke masa *the golden ages of Islam*, zaman nabi dan sahabat (Zuhri, 2011: 35-36).

Hasil tinjauan literatur tentang hubungan demokrasi dan Islam menunjukkan (pertama) bahwa fenomena gerakan ini lebih banyak dilihat dari dimensi politik yang melihat keberadaan mereka dari sudut pandang yang mendukung demokrasi. Demokrasi yang dikaji dibatasi pada aspek prosedur (pemilihan umum), kurang memberikan perhatian kepada substansi demokrasi.

Kedua, penelitian terdahulu terjebak pada cara berfikir oposisi biner dalam melihat fenomena umat Islam: kelompok Islam fundamentalis, ekstremis, radikal versus kelompok Islam moderat, liberal; kelompok Islam tekstualis, skripturalis/literalis versus kelompok Islam kontekstualis-kulturalis; kelompok Islam eksklusif versus kelompok Islam inklusif. Padahal, cara berfikir satu kelompok Islam yang disebut Islam fundamentalis memiliki varian yang bukan hanya berbeda tapi juga bertentangan satu sama lain.

Tulisan ini membahas bagaimana konstruksi nilai-nilai demokrasi oleh kelompok Islam fundamentalis di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah isu hak asasi manusia (HAM), kebebasan beragama, kelompok minoritas, dan kebebasan berekspresi. Kelompok Islam fundamentalis yang dimaksud adalah Jamaah Anshorut Tauhid/JAT, Majelis Mujahidin Indonesia/MMI, dan Hizbut Tahrir Indonesia/HTI.

## METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Penelitian ini tidak mengacu pada nilai-nilai keseragaman maupun sebuah upaya untuk merubah struktur besar. Pernyataan teoritis yang terdapat pada penelitian ini lebih mengacu kepada konstruksi suatu kelompok Islam fundamentalis terhadap nilai-nilai demokrasi. Konteks penelitian ini adalah media *online*. Cara pandang tersebut berguna untuk memberikan pemahaman yang membuat kita bisa memaknai permasalahan yang sesungguhnya di dalam arena sosial sehingga tidak hanya dimaknai dari perspektif kelas yang berkuasa (*dominan*) (Heiner, 2006: 7).

Paradigma konstruktivisme secara ontologis mengusung paham relativisme. Secara epistemologi, peneliti dan objek penelitian berupa pemahaman

terhadap konstruksi realitas kelompok fundamentalis terhadap nilai-nilai demokrasi merupakan produk interaksi antara peneliti dengan teks yang diteliti. Secara aksiologi, penelitian ini berusaha memahami (*verstehen*). Proses penelitian berparadigma konstruktivisme Secara methodologi bertumpu pada proses hermeneutika dan dialektika (Guba, 1994: 110).

Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi kelompok Islam fundamentalis terhadap isu HAM; kebebasan beragama, kelompok minoritas; dan kebebasan berekspresi. Kelompok Islam fundamentalis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok Islam Jamaah Anshurut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada wacana ketiga kelompok Islam tersebut di media *online* milik mereka. Media yang dimaksud adalah 1) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam penelitian ini adalah media *online*, yaitu: situs JAT ([ansharuttauhid.com](http://ansharuttauhid.com)), situs MMI ([majelismujahidin.com](http://majelismujahidin.com)), dan situs HTI ([hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id)). Pemilihan ketiga kelompok tersebut ditentukan secara *purposive judgement*. Pertimbangan pembatasan ketiga organisasi tersebut adalah karena alasan keseragaman objek. Tujuan mengkaji objek ini adalah agar lebih fokus, mengurangi variasi yang ada dalam satu umat Islam yang beragam corak pemikirannya (lihat Patton, 2002: 243).

Peneliti dalam pencarian wacana ini menggunakan kata-kata kunci, yaitu: “hak asasi manusia”, “hak azasi manusia”, kebebasan beragama”, “minoritas”, “kebebasan berekspresi”. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis wacana yang diperkenalkan oleh Theo Van Leeuwen. Model Theo Van Leeuwen menekankan pada representasi tindakan sosial (*social action*) dan aktor sosial (*social actor*). Model tersebut berusaha mendeteksi bagaimana suatu kelompok atau suatu tindakan diposisikan. Pemosisian sesuatu/seseorang dalam wacana didefinisikan oleh media *online* yang dimiliki oleh kelompok fundamentalis.

Perangkat wacana Theo Van Leeuwen dapat dibagi menjadi dua, yaitu strategi pelenyapan atau pengeluaran (*exclusion*) dan strategi kehadiran (*inclusion*). Pada tulisan ini Van Leeuwen menjelaskan bahwa strategi *exclusion* dilakukan dengan pasivasi, nominalisasi, penggantian anak kalimat (lihat Eriyanto, 2009: 173-178).

Ada dua konsep penting dalam eksklusi ini, yaitu eksklusi dalam arti *suppression* dan dalam arti *backgrounding*. Eksklusi dalam arti supresi (*suppression*) aktor sosial tidak dapat dilacak, dideteksi dalam bagian teks manapun (eksklusi radikal). Sementara itu, eksklusi dalam arti *backgrounding*, aktor sosial dihilangkan dalam teks namun disebutkan di bagian lain dan dapat dinalar walaupun tidak sepenuhnya benar.

Cara melakukan supresi adalah dengan kalimat pasif (*passive agent*) dan klausa nonfinitif/ infinitif, penghilangan “*beneficiaries*” atau aktor sosial yang mendapatkan keuntungan dari suatu tindakan sosial, nominalisasi, kata sifat, dan menghilangkan pelaku. Sementara itu, *backgrounding* dihasilkan dari kalimat *ellipses* dalam klausa noninfinitif dan klausa infinitif atau klausa parataktik (Leeuwen, 2008 : 55-73).

Terkait dengan strategi inklusi, Van Leeuwen memperkenalkan beberapa strategi inklusi, yaitu diferensiasi-indiferensiasi, objektivitas-abstraksi, nominasi-kategorisasi, nominasi-identifikasi, determinasi-indeterminasi, asimilasi-individualisasi. Strategi inklusi ini dapat dirinci sebagai berikut.

Alokasi Peran. Representasi dapat dapat memberikan peran aktif dan pasif. Pengaktifan (*activation*) terjadi ketika aktor sosial direpresentasikan sebagai orang yang aktif, dalam aktivitas. Sementara itu, pasivasi (*passivation*) terjadi ketika aktor sosial direpresentasikan sebagai orang yang “mengalami” aktivitas, atau sebagai “yang menerima akhir dari aktivitas”. Dalam fungsi tata bahasa, dalam struktur kalimat transitif, aktor sosial dikode sebagai (a) *actor* dalam proses material; (b) *behave* dalam proses perilaku; (c) *senser* dalam proses mental; (d) *sayer* dalam proses verbal; (e) *assigner* atau orang yang memberikan tugas dalam proses relasi antarindividu (Halliday dalam Leeuwen, 2008 : 33). Aktivasi ini dilakukan dengan peran aktif aktor sosial secara jelas (*foreground*), *circumstantialization* dengan preposisi dengan kata “oleh” atau “dari”, nominalisasi, dan posesifikasi.

Generalisasi (*generalization*) dan spesifikasi (*specification*). Pilihan antara generik dan spesifik adalah faktor penting dalam representasi aktor sosial. Mereka dapat direpresentasikan sebagai kelas/individu yang spesifik

Asimilasi (*assimilation*). Asimilasi dapat merujuk ke individu atau kelompok (*assimilation*). Asimilasi dapat dibagi menjadi dua: *aggregation* dan *collectivization*. *Aggregation* mengkuantifikasi

partisipasi, memperlakukan mereka dalam kaidah statistik sementara *collectivization* tidak.

Asosiasi dan Disosiasi (*Association and Dissociation*). Istilah ini merujuk kepada kelompok yang dibentuk oleh aktor sosial dan/atau kelompok aktor sosial yang tidak pernah dilabeli dalam teks. Pola umum asosiasi adalah parataksis (*parataxis*), *circumstance of accompaniment*, *possessive pronouns*, dan *possessive attributif*.

Indeterminasi dan Diferensiasi (*Indetermination and Differentiation*). Indeterminasi terjadi ketika aktor sosial direpresentasikan secara anonim. Determinasi terjadi ketika identitas mereka direpresentasikan secara spesifik. Indeterminasi diketahui dengan kata ganti tidak pasti (*indefinite pronoun*). Indeterminasi menganonimkan aktor sosial. Indeterminasi biasa terjadi juga pada referensi eksoforik yang digeneralisir (*generalized exophoric reference*). Indeterminasi juga terjadi dengan kalimat bilangan tidak tentu. Diferensiasi secara jelas membedakan aktor sosial individu atau kelompok aktor sosial dari aktor/kelompok yang mirip, menciptakan perbedaan antara “diri” dan “orang lain”.

Nominasi dan Kategorisasi (*Nomination and Categorization*). Aktor sosial direpresentasikan dengan identitasnya yang unik atau dengan identitasnya yang memiliki kesamaan dengan orang lain (*categorization*). Nominasi digunakan dengan menggunakan kata benda nama (*proper noun*), penghormatan (*honorification*) yang bersumber pada gelar atau pangkat.

Fungsionalisasi-Identifikasi (*Functionalization and Identification*). Identifikasi tidak berkaitan dengan apa yang mereka lakukan tapi berkaitan dengan siapakah mereka itu. Ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: klasifikasi, identifikasi hubungan, dan identifikasi fisik.

Personalisasi-Impersonalisasi (*Personalization impersonalization*). Personalisasi merepresentasikan aktor sosial sebagai manusia dengan *possessive pronoun*. Aktor sosial dapat pula diimpersonalisasi dengan cara kata benda abstrak dan kata benda konkret. Impersonalisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: abstraksi dan objektivasi.

Overdeterminasi (*overdetermination*). *Overdetermination* terjadi ketika aktor sosial direpresentasikan sebagai aktor yang berpartisipasi pada saat yang bersamaan, lebih dari satu praktik sosial. Overdeterminasi ini berbentuk inversi, simbolisasi, konotasi, distilasi.

Objektivasi-Deskriptivasi (*Objectivation and Descriptivization*). Aksi dan reaksi juga dapat diaktivasi dan deaktivasi (*deactivation*). Representasi reaksi dalam bentuk aktivasi bersifat dinamis sementara deaktivasi bersifat statis. Aksi yang *objectivied* dilakukan dengan nominalisasi atau proses yang berfungsi baik sebagai subjek maupun sebagai objek klausa atau bentuk bagian frase preposisional. Objektivasi dapat pula dilakukan dengan metonimi.

Generalisasi-Abstraksi (*Generalization and Abstraction*). Representasi yang berbeda bisa jadi akan mengeneralisasi aksi dan reaksi yang berbeda sampai pada derajat yang berbeda. Generalisasi dapat dilihat sebagai bentuk abstraksi. Generalisasi mengabstrakan dari aksi mikro yang spesifik. Bentuk lain dari abstraksi mengabstrakkan kualitas dari aksi atau reaksi. Inilah yang kemudian dikenal dengan *distillation*.

Overdeterminasi (*overdetermination*). Salah satu bentuk dari overdeterminasi yang umum terjadi adalah simbolisasi. Fungsinya mirip dengan *distillation*, simbolisasi (dengan metafora, alegori, dan sebagainya). Ini menekankan kualitas aksi daripada representasi aksi itu sendiri, mengandung tujuan dan legitimasi (*ibid*:179-189; Leeuwen, 1996: 32-70; 2008: 55-73).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan digambarkan bagaimana konstruksi kelompok Islam fundamentalis terhadap nilai-nilai demokrasi (HAM, kebebasan beragama, kelompok minoritas, kebebasan berekspresi).

### Konstruksi Kelompok Islam Fundamentalis terhadap Isu Hak Asasi Manusia (HAM).

JAT dan MMI mendukung HAM sebatas itu mendukung aspirasinya sebagai organisasi atau kelompok fundamentalis. HAM dijadikan dalil untuk memperkuat retorika. Namun, organisasi ini memiliki makna atau penafsiran yang berbeda. HAM itu dimaknai sebagai hak untuk melaksanakan syariat Islam dan menolaknya berarti melanggar HAM. HTI juga menerima prinsip HAM dengan catatan ditempatkan pada posisi subordinat dan Islam pada posisi superordinat. HTI menerima HAM itu sendiri namun menolak HAM jika dimanfaatkan untuk alat legitimasi kemaksiatan dan alat pendiskreditan Islam. Tabel berikut akan membandingkan ketiga organisasi fundamentalis tersebut. Perbandingan Konstruksi kelompok Islam fundamentalis terhadap HAM.

**Tabel 1** Konstruksi Kelompok Islam fundamentalis Terhadap Isu Hak Asasi Manusia (HAM)

JAT	MMI	HTI
JAT menerima dan mendukung HAM sebatas dapat mendukung aspirasinya. Misalnya pemerintah dikatakan melanggar HAM ketika mengeksekusi pelaku bom Bali yang disebut sebagai “mujahid”.	MMI menerima HAM, yang dimaknai sebagai hak untuk melaksanakan syariat Islam. Menolaknya berarti melanggar HAM.	HTI menerima prinsip HAM. Penerimaan HTI terhadap HAM diadaptasi dengan prinsip/doktrin agama. Prinsip HAM ditempatkan pada posisi <i>subordinat</i> dan Islam pada posisi <i>superordinat</i> . HAM tidak bisa digunakan untuk pendeskreditan Umat Islam dan legitimasi kemaksiatan.

**Sumber:** Data Hasil Penelitian 2015.

Persamaan ketiga organisasi tersebut adalah sama-sama menerima hak asasi manusia yang merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Argumen JAT menerima nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) adalah untuk melegitimasi kepentingan ideologi kelompok JAT itu sendiri. Misalnya pemerintah dikatakan melanggar HAM ketika mengeksekusi pelaku bom Bali. JAT memiliki keberpihakan terhadap pelaku bom Bali. JAT menjuluki pelaku bom Bali tersebut dengan julukan mujahid dan dihormati (honorifikasi) dengan menyebut mereka dengan “saudara”.

MMI juga menerima prinsip hak asasi manusia (HAM) dan melakukan reinterpretasi terhadap HAM untuk mendukung kepentingan ideologisnya. Ia memaknai HAM itu sebagai hak untuk melaksanakan syariat/hukum Islam. Menolak pelaksanaan syariat Islam berarti melanggar HAM. HTI juga menerima prinsip HAM dengan catatan bahwa HAM syarat harus ditempatkan pada posisi subordinat dengan Islam.

### **Konstruksi Kelompok Islam Fundamentalistis terhadap Kebebasan Beragama (*Freedom of Religion*).**

JAT bersifat offensif, mengkritik basis kepercayaan agama orang lain. Ia mengkritik konsep ketuhanan pemeluk agama lain yang dianggap aneh.

Begitu juga dengan MMI, ia tidak memiliki *mindfulness*, kesadaran atau sensitifitas kultural terhadap kelompok agama lain khususnya Nasrani, Kristen, Katolik yang menjadi objek kritik. Mereka dianggap tidak pernah mau mendukung kebersamaan, menghalalkan segala cara untuk misinya.

Kelompok Kristen –menurut HTI- terus medeskreditkan pemeluk agama lain dengan menekankan pada manufer mereka yang menggunakan tameng toleransi dan kerukunan umat beragama. Hubungan Islam dan umat agama lain dirusak oleh agama lain yang dipersepsikan sebagai pembuat masalah.

Pemeluk agama lain, khususnya Kristen atau non Islam lainnya adalah musuh karena kelompok agama Kristen menurut HTI, toleransi antarumat beragama atau kerukunan antarumat beragama hanyalah permainan.

Persamaan ketiga organisasi Islam tersebut terhadap kebebasan beragama adalah sama-sama menolak walaupun tidak secara eksplisit diverbalkan. Namun, argumen penolakan terhadap isu penting dalam kebebasan beragama seperti toleransi, kerukunan, penghormatan terhadap agama lain (*mindfulness*) menunjukkan penolakan terhadap kebebasan beragama yang merupakan bagian esensial dalam demokrasi substansialis.

Perbedaan diantara ketiga kelompok atau organisasi Islam fundamentalistis tersebut adalah pada cara argumennya. Cara penolakan yang dilakukan oleh JAT adalah dengan menggunakan argumen teologis. JAT tidak sensitif terhadap kepercayaan orang lain dengan mengkritik konsep ketuhanan agama lain. Sementara itu, MMI lebih menekankan pada hubungan sosial antarumat beragama yang menjadi unsur penting dalam kebebasan beragama.

MMI menolak kebebasan beragama. Argumennya bertumpu pada kebersamaan dimana agama lain dianggap tidak mendukung kebersamaan dan menghalalkan segala cara untuk misinya. Argumen HTI menolak kebebasan beragama berangkat dari pemaknaan hubungan yang bersifat rivalitas, yaitu hubungan Islam dengan agama lainnya ditempatkan dalam konteks permusuhan. Toleransi antarumat beragama dikatakan hanyalah permainan kelompok yang berbahaya kelompok Kristen terhadap umat Islam di Indonesia. Pemeluk agama lain adalah musuh Islam yang mendiskreditkan Islam. Tabel 2 menunjukkan perbandingan konstruksi ketiga organisasi tersebut.

**Tabel 2** Konstruksi Kelompok Islam Fundamentalis Terhadap Kebebasan Beragama (*Freedom of Religion*)

JAT	MMI	HTI
JAT tidak sensitif terhadap kepercayaan orang lain. JAT mengkritik konsep ketuhanan pemeluk agama lain sebagai konsep aneh dan membingungkan.	MMI tidak memiliki <i>mindfulness</i> , sensitifitas kultural terhadap agama lain yang dianggap <i>problem maker</i> .	HTI menekankan permainan penganut agama lain di balik toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Toleransi hanyalah permainan Kristen yang berbahaya terhadap kelompok Islam. Pemeluk agama lain adalah musuh karena terus berupaya mendiskreditkan umat Islam di Indonesia.

**Sumber:** Data Hasil Penelitian 2015.

### Konstruksi Kelompok Islam Fundamentalis Terhadap Kelompok Minoritas.

JAT berpihak kepada kelompok minoritas dalam konteks dukungan kelompok Muslim seperti Muslim di Xinjiang. Begitu juga dengan HTI yang bukan hanya menerima konsep penghargaan terhadap kelompok minoritas tapi memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks kelompok minoritas tersebut adalah Muslim. HTI memperjuangkan hak minoritas yang tertindas oleh kelompok dominan (pemerintah) yaitu Muslim Rohingnya, Pattani, Cham, Muslim Uighur, dan lain-lain. Kelompok minoritas Muslim tadi dikonstruksi sebagai kelompok yang mengalami praktik dehumanisasi dari kelompok dominan yaitu pemerintah yang direpresentasikan dari agama Hindu, Budha, Kristen.

Sementara itu, MMI lebih menekankan pada kondisi Indonesia yang mayoritas Muslim namun identitas mayoritas bukan Islam. Menurut MMI, identitas bangsa dan negara harus merujuk kepada kelompok dominan. Identitas Islam sebagai kelompok dominan harus menjadi rujukan identitas bangsa. Kelompok minoritas yang disorot dan menjadi sasaran kritik oleh MMI adalah kelompok lesbian. MMI menolak realitas sosial berupa lesbianisme dan pergaulan bebas.

**Tabel 3** Konstruksi Kelompok Islam Fundamentalis Terhadap Kelompok Minoritas

JAT	MMI	HTI
JAT berpihak kepada kelompok minoritas dalam konteks dukungan kelompok Muslim seperti Muslim di Xinjiang.	Identitas bangsa/negara harus merujuk kepada kelompok dominan bukan minoritas. Kelompok minoritas yang disorot oleh MMI adalah kelompok lesbianis. MMI menolak realitas sosial berupa lesbianisme dan pergaulan bebas ini.	HTI bukan hanya menerima konsep penghargaan terhadap kelompok minoritas tapi memperjuangkan hak-hak mereka sebatas kelompok minoritas itu Islam. Misalnya kelompok Muslim Rohingya, Pattani, Cham, Muslim Uighur, dan lain-lain.

**Sumber:** Data Hasil Penelitian 2015.

Tabel 3 menunjukkan perbandingan konstruksi kelompok Islam fundamentalis terhadap isu kelompok minoritas. Perbandingan ini menggambarkan bahwa keberpihakan ketiga kelompok muslim fundamentalisme tersebut hanya sebatas minoritas muslim. Dalam isu ini, yang ditekankan oleh MMI adalah soal identitas bangsa, negara yang harus merujuk ke kelompok mayoritas. Konteks MMI berbicara masalah ini adalah komunitas muslim di Indonesia. ini dapat dipahami bahwa ekspektasi MMI adalah adanya enkulturalisasi nilai-nilai Islam ke dalam tatanan masyarakat.

### Konstruksi Kelompok Islam Fundamentalis Terhadap Kebebasan Berekspresi (*Freedom of Expression*).

Menurut JAT, kebebasan ditempatkan dalam kerangka kehendak Allah. Ekspresi tidak bebas tapi ditempatkan pada kehendak Allah. Kebebasan hanyalah merugikan kaum muslimin karena terciptanya ruang bagi pemahaman yang sesat. MMI juga menolak kebebasan berekspresi. Bentuk ekspresi seperti liberalisme, pluralisme, kesetaraan gender, dan komunisme dikatakan sebagai program setan.

HTI tidak menolak prinsip kebebasan berekspresi. Namun, Ia menyangkan bahwa kebebasan berekspresi disalahgunakan oleh media satir untuk melakukan penghinaan Islam (misalnya Nabi, Al-Quran), dan mendiskreditkan Islam. Kebebasan berekspresi menurut HTI diletakkan hanya dalam konteks menjalankan aspirasi Islam. Perbandingan

Konstruksi kelompok Islam fundamentalis terhadap kebebasan berekspresi dapat merujuk ke Tabel 4.

**Tabel 4** Konstruksi Kelompok Islam Fundamentalis Terhadap Kebebasan Bereksprei (*Freedom of Expression*)

JAT	MMI	HTI
menolak kebebasan berekspresi. Kebebasan ditempatkan dalam kerangka kehendak Allah. Kebebasan berekspresi hanyalah merugikan kaum muslimin.	menolak kebebasan berekspresi. Bentuk ekspresi seperti liberalisme, pluralisme, kesetaraan gender dianggap sebagai program setan.	menerima kebebasan berekspresi. Ia hanya menyangkan kebebasan disalahgunakan untuk menghina dan mendiskreditkan Islam. Kebebasan berekspresi harus diletakkan dalam konteks menjalankan aspirasi Islam.

Sumber Data Hasil Penelitian 2015.

Ketiga kelompok muslim fundamentalisme tersebut, JAT dan MMI, dan HTI sebenarnya tidak menunjukkan sikap yang secara jelas menolak kebebasan berekspresi. Konteks penolakan terhadap kebebasan berekspresi adalah jika kebebasan tersebut dinilai merugikan Islam. MMI secara jelas menolak ekspresi kebebasan seperti liberalisme, pluralisme, kesetaraan gender. Jadi, kebebasan berekspresi dipahami oleh JAT, MMI, dan HTI secara berbeda. Makna kebebasan berekspresi ini disesuaikan dengan aspirasi dan nilai-nilai Islam. JAT misalkan menempatkan kebebasan berekspresi hanya dalam kerangka kehendak Allah. Begitu juga dengan MMI, ia menolak paham liberalisme, pluralisme, kesetaraan gender dan menganggapnya sebagai program setan.

Penolakan mereka itu relevan jika demokrasi hanya dipahami sebatas prosedural saja. Namun, sikap mereka terhadap nilai-nilai demokrasi mereka menerima, menikmati. Di sinilah letak penolakan mereka menemui titik anomali, bahkan ada sikap mereka yang bertentangan. Adapun pertentangan atau kontradiksi tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama, terkait dengan jaminan hak azasi manusia (HAM). Mereka menerima HAM. Namun, mereka menggunakan ini sebagai sarana untuk memasukan *idee* mereka sebagai bagian kelompok fundamentalis. HAM yang dimaksud oleh kelompok fundamentalis adalah hak untuk melakukan syariat atau hukum Islam. Membuat aturan perundang-undangan, mendirikan partai politik itu bukan HAM tapi wujud dari kesyirikan atau maksiat kepada Allah.

Kedua, demokrasi dipahami bukan hanya sekedar pengambilan keputusan tetapi sistem nilai dan sistem politik yang berdasarkan pada persamaan nilai dan martabat dari seluruh rakyat. Negara yang menghidupkan nilai-nilai demokrasi harus memedulikan kelompok minoritas. Kelompok fundamentalis dalam hal penghargaan terhadap minoritas, mereka menerimanya. Namun, keberpihakan terhadap kelompok minoritas ini perlu dikontekstualisasi. Keberpihakan terhadap minoritas tersebut hanya dalam konteks ikatan sebagai *Ummat Islam*.

Ketiga, terkait kebebasan berekspresi. Ekspresi kebebasan seperti liberalisme acapkali didelegitimasi dengan cara berargumen yang tidak konsisten. MMI menolak liberalisme dengan alasan itu bertentangan dengan Pancasila yang di dalamnya terdapat sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam teks yang lain, MMI menolak Pancasila karena Pancasila adalah bagian dari intervensi Yahudi dalam kitab Talmud dan dipengaruhi oleh doktrin *khamis qanun* milik gerakan freemasonry, yaitu monoteisme (Ketuhanan Yang Maha Esa), nasionalisme (berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu Yahudi), humanisme (kemanusiaan yang adil dan beradab bagi Yahudi), demokrasi (dengan cahaya Talmud suara terbanyak adalah suara tuhan), dan sosialisme (keadilan sosial bagi setiap orang Yahudi).

Keempat, terciptanya ranah publik. Ranah publik merupakan nafas kehidupan demokrasi. Ranah publik menyediakan ruang atau kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh setiap warganegara. Ruang publik untuk konteks sekarang ini bisa berwujud media komunikasi.

Internet sebagai media komunikasi membuka lebar-lebar bagi terciptanya *public sphere*. Dengan internet, kelompok fundamentalisme bebas melakukan kritik terhadap pemerintah, serta bebas menyebarkan pemikiran walaupun itu bertentangan dengan asas demokrasi yang melegitimasi *public sphere*. Internet memberikan peluang bagi kelompok fundamentalisme untuk mengartikulasikan pemahamannya, pandangannya walaupun pandangannya tersebut antidemokrasi.

## KESIMPULAN

Penolakan kelompok Islam fundamentalis terhadap demokrasi sebatas demokrasi minimalis, prosedural (pemilihan umum). Namun, mereka menerima nilai-nilai demokrasi (HAM, kelompok minoritas,

kebebasan berekspresi). Mereka cenderung menolak nilai demokrasi dalam bentuk kebebasan beragama. Penerimaan mereka terhadap nilai-nilai demokrasi harus dipahami dalam konteks nilai-nilai demokrasi yang bisa didamaikan dengan nilai-nilai Islam. Kelompok Islam fundamentalis melakukan adaptasi, reinterpretasi, kontekstualisasi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan aspirasi, visi nilai derivat Islam. Media *online* adalah sarana yang efektif untuk mendiseminasikan gagasan atau pemikiran kelompok Islam fundamentalis ini. Efektifitas penyampaian gagasan melalui disebabkan karakteristik internet itu sendiri yang bersifat *digital*, *manipulable*, dan *networkable*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok fundamentalisme itu merespon secara berbeda-beda terhadap nilai-nilai demokrasi. Ini menunjukkan bahwa kelompok ini bukanlah tunggal tapi banyak ragam mengekspresikan penolakannya. Oleh karena itu, penanganan kelompok Islam fundamentalis ini berbeda-beda pula. Ada kelompok fundamentalis yang membuka ruang diskusi, dialog seperti HTI dan MMI. Ada juga kelompok fundamentalis yang menutup ruang diskusi/dialog dengan pemerintah karena ia dipersepsikan sebagai kafir.

Implikasi sosial bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini memberikan pemahaman sehingga masyarakat tidak sampai melakukan stigmatisasi terhadap semua kelompok fundamentalis yang memiliki kesamaan pada aspek permukaan (menolak demokrasi) atau ciri fisik.

Kajian selanjutnya (*further research*), hasil penelitian ini bisa dijadikan kajian untuk melihat gejala sosial ini secara lebih mendalam, dengan pendekatan atau paradigma yang berbeda-beda. Keterbatasan dalam penelitian ini bisa dilengkapi dengan kajian lain yang melihat dari dimensi yang berbeda untuk melengkapi keterbatasan penelitian ini, misalnya, melihat fenomena fundamentalisme dari sisi hubungan antara agen-struktur, atau mengkaji mereka dari sisi pengalaman mereka (*fenomenology*), argumentasi mereka dalam mendelegitimasi sistem demokrasi, atau bagaimana peta jaringan sosial kelompok Islam fundamentalisme nasional dengan jaringan kelompok Islam fundamentalis global.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini adalah bagian dari tugas kuliah saya yang didanai oleh Balitbang SDM kemkominfo. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih khususnya

TPSDM dan kepada Pak Eriyanto atas masukan untuk perbaikan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga kepada pengelola "Jurnal Pekommas".

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdula'la. (2008). "Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara. Akar dan Karakteristik Pemikiran dan Gerakan Kaum Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan". Pidato Ilmiah Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sejarah Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 17 Mei 2008.
- Ausop, A.Z. (2009). Demokrasi dan Musyawarah Dalam Pandangan Darul Arqam, NII, dan Hizbut Tahrir Indonesia *Jurnal Sosioteknologi, Edisi 17 Tahun 8, Agustus 2009*, pp.601-620.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik (BPS), United Nation for Development Programs (UNDP). (2011) Indeks Demokrasi Indonesia, Jakarta.
- Dahl, R.A. (2000). *On Democracy*. New Haven & New York Yale University Press.
- Eriyanto. (2009). Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta LkiS.
- Gaffar, A. (1996). Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi. Jakarta Pustaka Pelajar.
- Guba, E.G. (1994). "Competing Paradigms In Qualitative Research". In Denzin, Norman K., Lincoln, Yvonna S (ed). *Handbook of Qualitative Research*. London, Thousand Oaks-CA., New Delhi: Sage Publications, Inc.
- Haqqani, H. (2013). *Islamists and Democracy: Cautions from Pakistan*. *Journal of Democracy*. Volume 24, Number 2 April 2013. National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.
- Heiner, R. (2006). *Social Problems: An Introduction To Critical Constructionism* (2ed.). New York: Oxford University Press.
- Huntington, S.P. (1995). Gelombang Demokratisasi Ketiga (Terj. Asril Marjohan). Jakarta PT Pustaka Utama Grafiti.
- Javaid, U. (2011). *Thriving Fundamentalism and Militancy in Pakistan An Analytical Overview of their Impact on the Society. A Research Journal of South Asian Studies, Vol. 26, No. 1, January-June 2011, pp. 9-18*.
- Leeuwen, T.V. (2008). *Discourse and Practice New Tools For Critical Discourse Analysis*. NY: Oxford University Press, Inc.
- Liddle, R.W. (1997). Islam, Politik, dan Modernisme, Cet. 1. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Marquand, D., Nettle, R.L (eds). (2000). *Religion and Democracy*. Oxford Blacwell Publisher.
- Meyer, T. (2002). Demokrasi Sebuah Pengantar Untuk Penerapan. Jakarta D'print Communication.
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Method*. London, Thousand Oaks, CA., New Delhi Sage Publications.

Qohar, A. (2011). Arah Gerakan Sosial Kelompok Fundamentalisme Salafi Lampung”, *Jurnal TAPIS*, Vol.7, No.13 Juli-Desember 2011, pp. 62-77.

Suyatno. (2004). *Menjelajah Demokrasi*. Yogyakarta Liebe Book.

Zuhri, S. (2011). "Revitalisasi Pancasila" dalam Pancasila, Negara Kesejahteraan, dan Ketahanan masyarakat, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, Edisi 2, Agustus.

Halaman ini sengaja dikosongkan